



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telp/Fax (022)6642733
website:<https://diskominfo.cimahikota.go.id> e-mail:diskominfo@cimahikota.go.id
Cimaahi 40513 Jawa Barat

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOTA CIMAHI

067/038/IKPS/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

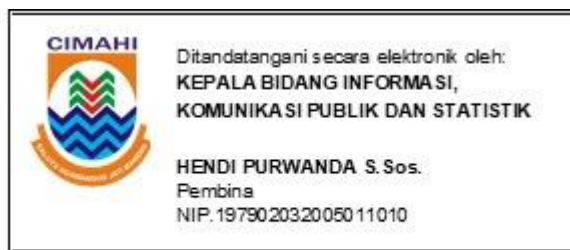
- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 067/039/IKPS/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 067/039/IKPS/2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 16 Mei 2025

**KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI
SELAKU PPID UTAMA**



LAMPIRAN I
TENTANG : DAFTAR
INFORMASI PUBLIK DAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
NOMOR : 067/038/IKPS/2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Berkala

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Informasi Tentang Profil Badan Publik; Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap Pemerintah Daerah Kota Cimahi	PPID Utama	Sekretariat Daerah	Tahun 2001	Hard dan Softcopy	Selama berlaku
2.	Ringkasan Tentang Informasi Program dan atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik; Berisi tentang Daftar program dan kegiatan lembaga perangkat daerah	PPID Utama	Bappeda	Setiap Awal Tahun	Hard dan Softcopy	5 Tahun
3.	Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik; Berisi tentang Laporan kinerja pemerintah daerah	PPID Utama	BPPKAD	Setiap Awal Tahun	Hard dan Softcopy	5 Tahun

4.	Informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit; Berisi tentang Laporan-laporan pertanggung jawaban/ realisasi penggunaan anggaran pemerintah daerah	PPID Utama	BPPKAD	Setiap Awal Tahun	Hard dan Softcopy	5 Tahun
5.	Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik; Memuat antara lain : 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; serta 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik.	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
6.	Informasi Khusus Lain yang Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat; Menyajikan jenis-jenis pelayanan yang dimiliki oleh jajaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Organisasi Perangkat Daerah	PPID Utama	Lembaga teknis terkait	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
7.	Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik; Memuat alur permohonan, syarat permohonan dan pengajuan keberatan dari masyarakat yang	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

	membutuhkan pelayanan informasi					
8.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; Memuat antara lain : 1. Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya 2. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 3. Anggaran layanan Informasi Publik 4. Laporan penggunaan anggaran.	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
9.	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa; Memuat daftar paket pelelangan yang terdiri dari : 1. Nama lelang, 2. Tanggal pembuatan 3. Lingkup pekerjaan 4. Tahap lelang saat ini 5. Satuan kerja 6. Kategori 7. Metode Pengadaan 8. Metode dokumen 9. Tahun anggaran 10. Nilai Pagu Paket dan HPS 11. Jenis Kontrak 12. Lokasi Pekerjaan 13. Syarat Kualifikasi dan 14. Peserta Lelang	PPID Utama	Bagian Pangadaan Barang Jasa SETDA	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
10.	Informasi Tentang Ketenagakerjaan; Informasi tentang penerimaan	PPID Utama	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

	dan proses seleksi terbuka pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi					
11.	Informasi yang sedang diproses dan regulasi yang telah disahkan/ditetapkan ; Memuat antara lain : 1) Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan 2) Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan	PPID Utama	Bagian Hukum SETDA	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
12.	Informasi mengenai bencana alam, meliputi kebakaran, tanah longsor, banjir, gempa bumi, cuaca ektrim serta berisi tentang jalur evakuasi, Simulasi Gempa dan Prosedur Penanganan Bencana	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
13.	Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya berbasis sistem	PPID Utama	Sekretariat Daerah	Tahun 2025	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku
14.	Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik; 1) Alur/Skema pengaduan (tata cara)	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2025	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

	2) Form/lembar isian pengaduan dan 3) Kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik					
15.	Informasi yang memuat dokumen peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan /disahkan oleh Badan Publik dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang memuat; 1) Peraturan Daerah (Perda) 2) Peraturan Wali Kota (Perwal) 3) Surat Keputusan Wali Kota (SK Wali Kota) 4) Surat Keputusan Sekretaris Daerah (SK Sekda) 5) Standar Operasional Pelayanan (SOP Kegiatan)	PPID Utama	Sekretariat Daerah	Tahun 2025	Hard dan Softcopy	Selama Berlaku

- **Keterangan :** Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Serta Merta

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Layanan pengaduan melalui Email	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	https://webmail.cimahikota.go.id	Selama Berlaku
2.	Layanan pengaduan melalui SP4N Lapor	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	https://www.lapor.go.id	Selama Berlaku
3.	Layanan pengaduan melalui SMS dan Whatsapp Center	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	www.pesduk.cimahikota.go.id	Selama Berlaku
4.	Pengaduan Langsung	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2011	Datang langsung ke Diskominfo Kota Cimahi	Selama Berlaku

- **Keterangan :** Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Tersedia Setiap Saat

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Draft/Rancangan Daftar Informasi Publik Kota Cimahi ; Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat & dikecualikan	PPID Utama	PPID Kota Cimahi	Tahun 2025	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
2.	Daftar Informasi Publik PPID Pembantu Kota Cimahi; Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan di tingkat OPD	PPID Utama	Lembaga Teknis Terkait	Tahun 2025	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku

- Keterangan :** Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

**KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI
PUBLIK DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA CIMAHI SELAKU PPID
UTAMA**



LAMPIRAN II
Surat Keputusan PPID Utama
Nomor : 067/038/IKPS/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	BATAS WAKTU
1.	Informasi Persandian 1. Dokumen Persandian 2. Daftar Internet Protokol (Kode Akses elektronik,) 3. Daftar User & Password perangkat jaringan	• Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 25,31 dan 40 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	5 Tahun
2.	Informasi Pemerintahan Data-data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/Negara	• UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara • Peraturan Mentri Dalam Negri No. 16 Tahun 2011 tentang KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah)	Membahayakan Pemerintahan atau Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	5 Tahun
3.	Informasi Hukum Daftar orang yang terlibat Organisasi Terlarang	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	5 Tahun

4.	Informasi Kesekretariatan Biodata orang Perpustakaan yang memuat Nama, Alamat, NIK, No. Telepon, Email	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf e	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam pemanfaatan layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perlindungan data pribadi	5 Tahun
5.	Informasi Keuangan dan Asset - Dokumen Pemanfaatan BMN - Dokumen Inventarisasi BMN - Laporan hasil audit pemeriksaan Khusus - Laporan hasil Pengawasan Internal - Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa - Proses Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk penyelesaian senggah	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pemandagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	• Menimbulkan pro kontra di kalangan Masyarakat terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN • Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait • Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan yang tidak sehat	• Memastikan keamanan pemanfaatan dan pemindahtanganan sarana prasarana BMN • Melindungi para pihak yang terlibat kontrak • Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan	5 Tahun atau sampai dengan penandatanganan perjanjian kontrak
6.	Informasi Inspektorat - Dokumen Pemeriksaan, Review, dan Evaluasi - Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaaan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	• Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara • Membantu badan publik dalam Menyusun kebijakan	5 Tahun
7.	Informasi Kepegawaian - Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dikatuhi hukuman - Data usulan pengangkatan, proses mutase PNS dalam jabatan structural dan fungsional - Usulan formasi CASN	• UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian • Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	• Mengungkap data ASN yang bersifat rahasia • Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	• Melindungi data ASN yang bersifat rahasia • Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	5 Tahun Atau sampai penyerahan Surat Keputusan
8.	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Data Client jaringan Dinas	• Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/merubah bentuk jaringan yang	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari	5 Tahun

	Dukcapil - Tipologi dan konfigurasi jaringan LAN Dinas Dukcapil - Daftar User dan Password perangkat jaringan LAN Dinas Dukcapil - Data Aplikasi yang diakses oleh instansi	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	ada	pihak yang tidak bertanggungjawab	
9.	Informasi Kesehatan Dokumen terkait kefarmasian dan alat kesehatan	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap riwayat medis pengobatan fisik dan psikis seseorang	Melindungi riwayat medis pengobatan fisik dan psikis seseorang	5 Tahun
10.	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM - Data pribadi orang asing dan tenaga kerja asing - Data pribadi tenaga kerja - Struktur dan Skala Upah	• UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	• Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia • Mengungkap data Perusahaan yang bersifat rahasia	• Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia • Melindungi data Perusahaan yang bersifat rahasia	Selama berlaku
11.	Lingkungan Hidup - Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda - Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Menghambat proses penegakan hukum • Menghambat proses penyelesaian sengketa	• Kelancaran proses penegakan hukum • Kelancaran proses penyelesaian sengketa	Selama berlaku
12.	Informasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, asset dan design bangunan	• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen rahasia Perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen rahasia Perusahaan/perorangan	Selama berlaku
13	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dilaksanakan dan belum dilakukan Audit oleh pihak yang berwenang terdiri atas : • Kerangka Acuan Kerja	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa	• Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	• Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat • Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan laporan sudah diaudit

	(KAK); • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; • Spesifikasi Teknis; • Rancangan Kontrak; • Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; • Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; • Daftar Kuantitas dan Harga; • Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; • Gambar Rancangan Pekerjaan; • Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; • Dokumen Penawaran Administratif; • Surat Penawaran Penyedia; • Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum	Pemerintah			
--	---	------------	--	--	--

	dan Hak Asasi Manusia; • Berita Acara Pemberian Penjelasan; • Berita Acara Pengumuman Negosiasi; • Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; • Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; • Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; • Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); • Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan • Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan,				
--	--	--	--	--	--

	spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak • Surat Perintah Mulai Kerja; • Surat Jaminan Pelaksanaan; • Surat Jaminan Uang Muka; • Surat Jaminan Pemeliharaan; • Surat Tagihan; • Surat Perintah Membayar; • Surat Perintah Pencairan Dana; • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; • Laporan Penyelesaian Pekerjaan; • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan				
--	---	--	--	--	--

**KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI
PUBLIK DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA CIMAHI SELAKU PPID
UTAMA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HENDI PURWANDA, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790203 200501 1 010